

POTRET PERSEPSI NILAI GENDER DALAM PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA SUKOJEMBER, KECAMATAN JELBUK, KABUPATEN JEMBER

Portrait of Gender Value Perception in The Stunting Reduction Acceleration Programme in Sukojember Village, Jelbuk District, Jember, Indonesia

Atik Rahmawati¹, Ni'mal Baroya^{2*}, Leersia Yusi Ratnawati², Globila Nurika², Elok Permatasari²

¹Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP, Universitas Jember, Indonesia,

²Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM, Universitas Jember, Indonesia,

*E-mail: nbaroya@unej.ac.id

ABSTRAK

Desa Sukojember merupakan lokasi fokus dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Jember. Komitmen dan partisipasi aktif pelaksana dalam mencapai tujuan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa kegiatan tidak berjalan karena pelaksana merasa malu menjalankan perannya. Sikap ini dipengaruhi oleh persepsi gender bahwa kegiatan penurunan stunting lebih pada urusan rumah tangga, sehingga perempuan dianggap lebih memahami. Tujuan kajian ini adalah untuk mengeksplorasi perspektif peran gender dalam pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Kegiatan tersinergi dengan pendampingan percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh Universitas Jember bekerjasama dengan Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Jember. Penelitian dilakukan pada bulan September 2022. Penggalan data dilakukan dengan wawancara dan diskusi kelompok terarah pada 12 informan pelaksana. Teknik penentuan informan menggunakan purposive dari Tim Percepatan Penurunan Stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi peran gender dibentuk dari faktor internal, berupa anggapan pribadi pelaksana, bahwa kegiatan penurunan angka stunting adalah persoalan domestik keluarga, sehingga perempuan dipandang lebih bertanggungjawab. Faktor eksternal dilatarbelakangi oleh budaya Madura, yang beranggapan bahwa tradisi dari penerapan nilai-nilai kultural yang masih fokus pada budaya patriarki. Persepsi dikuatkan oleh adanya dominasi pengurus berjenis kelamin perempuan yaitu 8 dari 12 pelaksana. Persepsi berpengaruh terhadap percepatan penurunan stunting yang ditunjukkan dengan kegiatan kampung keluarga berkualitas yang tidak pernah dilakukan di desa.

Kata kunci: Pelaksana Program, Persepsi, Gender, Stunting.

ABSTRACT

Sukojember Village is a focus location for reducing stunting rates in Jember Regency. The commitment and active participation of implementers in achieving goals are essential factors in the program's success. The reality that occurs shows that the activity does not go on because the executor feels ashamed to carry out his role. The gender perception influences this attitude that stunting reduction activities are more about household affairs so that women are considered to understand better. The purpose of this study is to explore the perspective of gender roles in the implementation of activities to accelerate stunting reduction. The research uses qualitative methods with the type of case study. This research is synergized activities with assistance in accelerating stunting reduction were carried out by the University of Jember in collaboration with the National Family Planning Coordinating Board. The study was conducted in September 2022. Data was collected through interviews and focus group discussions with 12 implementors. The technique of determining the informants used purposive from the Stunting Reduction Acceleration Team. The results showed that the perception of gender roles was formed from internal factors in the form of personal assumptions of implementers that stunting reduction activities are domestic family problems so that women are seen as more responsible. External factors are motivated by Madurese, which assumes that the tradition of applying cultural values still focuses on patriarchy. Perceptions are corroborated by the dominance of female administrators, 8 out of 12 implementors. Perceptions affect accelerating the reduction of stunting, shown by quality family village activities programs that have never been carried out in the village.

Keywords: Program Implementers, Perceptions, Gender, Stunting.

PENDAHULUAN

Desa Sukojember merupakan 1 dari 34 lokasi fokus percepatan penurunan angka stunting yang ada di Kabupaten Jember (Pemkab Jember, 2021). Percepatan penurunan angka stunting di Indonesia masih menjadi program prioritas pembangunan sampai pada tahun 2024. Pemerintah pada tahun 2024 menargetkan prevalensi stunting sebesar 14 persen. Target tersebut dicapai dengan dua intervensi holistik yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dan kepada ibu sebelum dan di masa kehamilan, yang umumnya dilakukan di sektor kesehatan. Sedangkan intervensi sensitif dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan merupakan kerja sama lintas sector (Humas, 2022). Keputusan Bupati Jember No. 188.45/455/1.12/2021 tentang Penetapan Desa/ Kelurahan Lokus Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jember tahun 2022 merupakan upaya spesifik, intervensi sensitive dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara integrative dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember, Kecamatan. dan desa/ Kelurahan serta pemangku kepentingan (Pemkab Jember, 2021).

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan intervensi sosial adalah pelaksana, yaitu mereka yang berperan sebagai garda depan, sumber daya penggerak, ujung tombak pelaksanaan kegiatan, serta berhadapan langsung dengan masyarakat. Gunn dalam Parsons (2008) menyatakan bahwa implementasi untuk penyediaan layanan manusia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan tergantung pada sifat dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan suatu program. Personel yang ada apakah mereka mencukupi, siap, dan punya kualifikasi yang tepat.

Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarr multisektor di pusat, daerah, dan desa (Presiden, 2021). Sebagai langkah strategis eliminasi stunting, pemerintah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

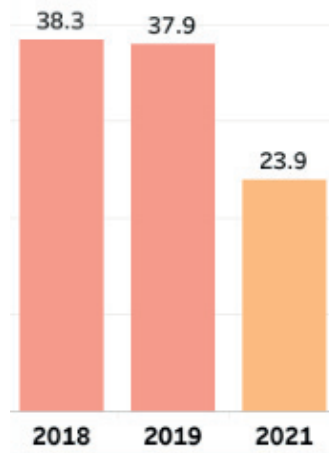
TPPS bertugas mengoordinasi, menyinergikan, mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah (Presiden, 2021).

Di tingkat desa, pemerintah desa melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan stunting. Pemerintah desa memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas dan bidan desa, serta petugas Keluarga Berencana (KB) (tnp2k, 2018).

Realitas di Desa Sukojember, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak berjalan secara maksimal. Fenomena yang diperoleh pada saat assessment dari rangkaian kegiatan pendampingan percepatan penurunan stunting oleh Universitas Jember yang bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada Oktober 2022 menunjukkan bahwa pelaksana tidak optimal menjalankan kinerja, terdapat pelaksana yang mengutarakan mengundurkan diri sehingga tidak bersedia untuk hadir pada saat koordinasi kegiatan percepatan penurunan stunting. Alasan pengunduran diri disebabkan karena adanya perasaan malu yang dipengaruhi oleh persepsi gender bahwa kegiatan penurunan stunting lebih urusan domestic keluarga sehingga perempuan dianggap lebih mengerti dan lebih berperan.

Tidak optimalnya kinerja pelaksana tentu saja akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan angka stunting di desa Sukojember, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Disisi lain, menurut data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 tercatat prevalensi angka *stunting* di Kabupaten Jember mencapai 37,94 persen dan menduduki peringkat tertinggi kedua di Provinsi Jatim untuk kasus *stunting* (Sudikno, 2019). Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi angka *stunting* Kabupaten Jember telah turun menjadi 23,90 persen (Sekretariat Wakil Presiden, 2022).

Tabel 1. Trend Balita Stunting Tingkat Kabupaten Jember Tahun 2018-2021



Sumber: (Sekretariat Wakil Presiden, 2022)

Berdasar pada fenomena tersebut diatas, maka pertanyaan penelitian dalam kajian ini yaitu; Bagaimana potret persepsi nilai gender dalam program percepatan penurunan stunting di desa Sukojejer, kecamatan Jelbuk, kabupaten Jember ?.

Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi potret persepsi nilai gender serta dampaknya bagi program percepatan penurunan stunting di desa Sukojejer, kecamatan Jelbuk, kabupaten Jember.

METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Kegiatan tersinergi dengan pendampingan percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh Universitas Jember bekerjasama dengan Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Jember. Penelitian dilakukan pada bulan September 2022. Penggalan data dilakukan dengan wawancara dan diskusi kelompok terarah yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 pada 16 informan pelaksana yang merupakan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Jelbuk, TPPS desa Sukojejer, Tim Pendamping Keluarga (TPK) desa Sukojejer, dan Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (TK3KB) desa Sukojejer. Teknik penentuan informan menggunakan purposive dari Tim Percepatan Penurunan Stunting.

Analisis data dengan menggunakan teknik tematik, berdasarkan tema-tema utama hasil penelitian. Tema terkasifikasi atas 3 kategori yaitu: stunting di desa sukojejer; aktor pelaksana program eliminasi stunting; persepsi, perspektif gender, dan nilai budaya, dan pelaksanaan program eliminasi stunting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stunting Di Desa Sukojejer

Desa Sukojejer Secara administratif terletak di Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Secara pemerintahan terdiri dari 7 (tujuh) dusun yaitu; Dusun Krajan Barat, Dusun Krajan Timur, Dusun Leces 1, Dusun Leces 2, Dusun Cangkring, Dusun Tegal Batu 1, dan Dusun Tegal Batu 2 dengan luas wilayah 5,88 Km² (BPS, 2021).

Hasil identifikasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pemerintah kabupaten Jember menunjukkan bahwa desa Sukojejer merupakan lokus dari penanganan percepatan penurunan stunting. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak bayi di bawah lima tahun (balita) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek (*stunted*) dan sangat pendek (*severely stunted*) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO *Multicentre Growth Reference Study* pada tahun 2006. *Stunting* menurut Kementerian Kesehatan didefinisikan sebagai anak balita dengan nilai z-scorenya kurang dari -2SD *standar deviasi stunted*, dan kurang dari - 3SD *severely stunted* (tnp2k, 2017).

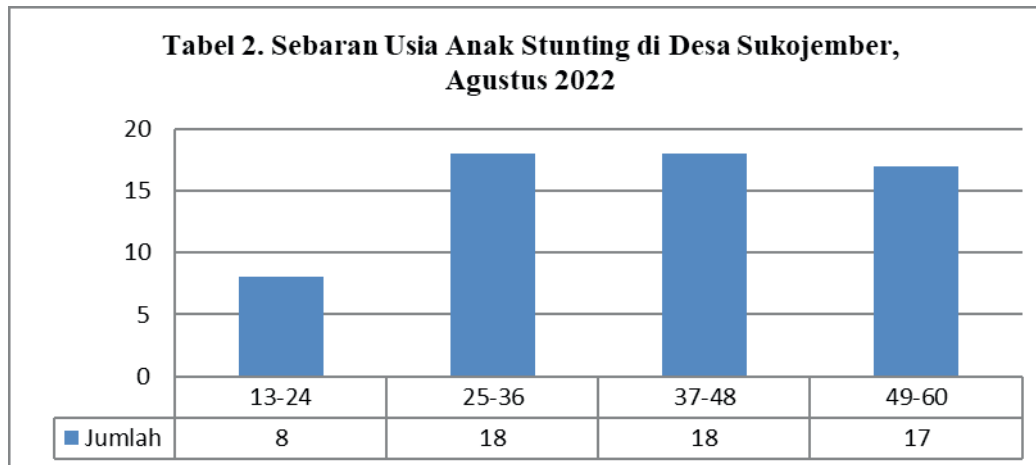
Berdasarkan data dari Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Jelbuk yang diambil dari data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang diinput pada bulan Agustus 2022 menunjukkan bahwa terdapat 61 anak yang teridentifikasi dalam kondisi stunting. Kementerian Kesehatan (2019) mendeskripsikan bahwa aplikasi e-PPGBM merupakan aplikasi yang digunakan para pengurus dan kader posyandu untuk

melakukan pencatatan dan pelaporan status gizi ibu dan anak.

Data menunjukkan bahwa rentang usia anak dalam kondisi stunting antara 13 sampai dengan 58 Bulan. Kelompok usia 13-24 bulan sebanyak 13,11 %, 25-36 bulan sebanyak anak usia 13-24 Bulan dan 37-48 bulan sebanyak 29,5%, sedangkan kelompok usia 49-60 bulan ada 27,9%. Sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini;

sasaran dalam percepatan penurunan stunting di tingkat Desa;

3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan dan pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di tingkat Desa;
4. Melaksanakan rembuk stunting Desa minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;



Sumber: (PLKB Kecamatan Jelbuk, 2022)

Aktor Pelaksana Program Eliminasi Stunting

Tim Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya disebut TPPS adalah lembaga yang dibentuk lintas sektor untuk melakukan koordinasi, sinergi dan integrasi program kegiatan percepatan penurunan stunting dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota, serta Pemerintahan Desa (Tim Kementerian Dalam Negeri et al., 2021).

TPPS Desa Sukojember ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sukojember No. 9 Tahun 2022, tanggal 1 maret 2022 tentang Susunan TIM Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa Sukojember, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember TPPS Mempunyai tugas mengkoordinasi, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat Desa yang dilaksanakan dengan:

1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat Desa;
2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga beresiko stunting (KRS) dalam pendampingan, pelayanan, dan rujukan stunting bagi kelompok

5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada kepala Desa.

Namun demikian, realitas yang didapat pada saat FGD menunjukkan bahwa pelaksana TPPS Desa Sukojember tidak mengetahui kepanjangan dari TPPS, tugas, peran, serta tidak menerima secara langsung SK penunjukan sebagai TPPS.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat lebih mengenal dan memahami peran dari Tim Pendamping Keluarga (TPK). TPK berjumlah 12 orang, dibentuk lebih dahulu pada tanggal 3 Januari 2022. Secara legal formal TPK dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Desa No. 800/010/35.09.25.2003/2022 tentang Tim Pendamping Keluarga Desa Sukojember.

Penelusuran atas dokumen serta hasil wawancara menunjukkan bahwa dari 11 pelaksana di TPPS, 9 diantaranya adalah TPK. Sedangkan dari TPPS terdapat 1 pelaksana yang berperan sebagai sekretaris sekaligus sebagai koordinator bidang lapangan pengelolaan data. Kondisi ini menunjukkan kurangnya sumber daya manusia yang dapat digerakkan dan dimanfaatkan dalam program penurunan percepatan stunting di desa Sukojember.

Data keluarga dan informasi kependudukan krusial dan penting dalam program eliminasi stunting (Purnomo et al., 2021; Putri, 2022). Hasil pendataan berfungsi sebagai base line untuk melakukan proses intervensi. Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga menjadi solusi penyediaan data yang pelaksanaannya secara konvergen dan terintegrasi dalam program Kampung Keluarga Berkualitas. Implementasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sukojember No. 470/04/35.09.25.2003/2021 tanggal 26 Juli 2021, tentang Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (TK3KB) Desa Sukojember. Tugas TK3KB adalah;

1. Merumuskan strategi pengembnagan kampung keluarga berkualitas di Desa Sukojember.
2. Mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi pengembangan kampung keluarga berkualitas di desa Sukojember.
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi, baik perencanaan maupun dalam pelaksanaan program pengembangan kampung keluarga berkualitas.
4. Memberikan pelayanan informasi pengembangan kampung keluarga berkualitas.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kampung keluarga berkualitas.
6. Membentuk secretariat sesuai kebutuhan.
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa Sukojember.

Hasil temuan menunjukkan bahwa TK3KB desa Sukojember tidak menjalankan fungsinya secara optimal, kegiatan lebih difokuskan di tingkat kecamatan. Kinerja tim yang tidak maksimal juga disebabkan karena koordinator mengundurkan diri, sementara belum ada pengganti dikarenakan masih menunggu proses perbaruan SK yang rencananya akan dilakukan di akhir tahun. Sebagaimana diungkapkan oleh Informan berikut;

“Sudah dibentuk TPPS, TPK desa Sukojember. Tapi ndak jalan, ndak maksimal, ada yang tidak pernah datang, ndak kerja. Namanya ada di SK. Kalau mau diganti harus menunggu akhir tahun”. (TPPS desa Sukojember, Kepala Desa Sukojember)

“Kalau di Kecamatan Jelbuk, penetapan Kampung KB ada di Dusun Cangkring, Desa Sukojember. Karena waktu itu tahun 2017 dilihat angka stuntingnya tinggi. Tapi ya itu TKK Kampung KB sudah ada SKnya tapi tidak berjalan. Kalau mau dilakukan perubahan SK ya, harus menunggu dulu. Bisa dilakukan akhir tahun”. (PLKB Kecamatan Jelbuk)

Persepsi, Perspektif Gender, Nilai Budaya, Dan Pelaksanaan Program Eliminasi Stunting

Persepsi adalah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam merespon sesuatu (Alizamar & Couto, 2016). Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut proses sensoris. Individu menerima bermacam-macam stimulus yang datang dari lingkungan. Tetapi tidak semua stimulus diperhatikan atau akan diberikan respon. Stimulus dipilih dan diterima dan kemudian memberikan reaksi terhadap stimulus tersebut (Saleh, 2018).

Persepsi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingannya suatu objek (Thoha, 2016).

Istilah gender berawal dari adanya perbedaan faktor biologis antara perempuan dan laki-laki. Perempuan berbeda secara jasmaniah dari laki-laki, perempuan mengalami haid, dapat mengandung, melahirkan serta menyusui yang melahirkan mitos dalam masyarakat bahwa perempuan berhubungan dengan kodrat sebagai ibu (Suhapti, 1995). Perspektif ini memandang bahwa perempuan lebih dominan bekerja di ranah domestik keluarga, sedangkan laki-laki bekerja di ranah publik.

Persepsi peran gender dibentuk dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa

anggapan pribadi pelaksana, bahwa kegiatan penurunan angka stunting adalah persoalan domestik keluarga, sehingga perempuan dipandang lebih bertanggungjawab. Sedangkan faktor eksternal dilatarbelakangi oleh budaya masyarakat setempat yang mayoritas dari etnis Madura. Masyarakat Madura beranggapan bahwa tradisi dari penerapan nilai-nilai kultural yang masih fokus pada budaya patriarki. Persepsi dikuatkan oleh adanya dominasi pengurus berjenis kelamin perempuan.

Warga Sukojember mayoritas merupakan masyarakat Madura perantauan (Rato & Zulaika, 2018). Budaya Patriarki membatasi kebebasan kaum perempuan Madura ke dalam ruang yang sempit. Perempuan dipandang hanya berperan sebagai pekerja rumah tangga, pemuas nafsu laki-laki, juru masak di dapur, dan pengurus anak seumur hidup sehingga sulit menjamah ruang public (Ihya'Ulummudin et al., 2022). Bagi masyarakat Madura perantauan yang ada di Desa Sukojember, pespektif ini masih menjadi panutan, tercermin ungkapan pelaksana yang merasa “*todus*” atau dalam bahasa Jawa “*isin*”, dan dalam Indonesia “malu” berperan aktif kegiatan eliminasi stunting. Bagi pelaksana yang notabene adalah laki-laki memandang bahwa persoalan stunting berkaitan erat dengan tugas dan peran ibu atau istri dalam memberikan pengasuhan dan asupan makanan yang bergizi untuk anak-anak mereka. Bahwa stunting adalah urusan domestik yang menjadi tanggung jawab perempuan. Sebagaimana informasi dari informan bahwa ;

“Kalau kampung KB memang saya yang dipilih, tapi kegiatan tidak ada. saya dulu ndak mau sebetulnya. mosok saya disuruh ngurusi *wong wedok-wedok* (perempuan). Saya sudah bilang ndak mau. Saya pernah datang satu perkumpulan PK21 di kecamatan. *Mrono* aku, *wedok kabeh*. *Todus*, *isin*, malu aku. Ndak enak, *isin* aku. *ngene iki*, jadi untuk tim TPK, tim Kampung KB saya sendiri ndak cari-cari orang. Ya harus ganti semua yang tidak aktif termasuk saya”. (TPPS desa Sukojember)

“Kalau TPPS, TPK, Tim Kelompok Kerja Kampung Berkualitas di desa

Sukojember sudah terbentuk. Ada Surat Keputusan dari Kepala Desa. Hanya tidak maksimal kerjanya. Kader dari ibu-ibu aktif, menggerakkan bapak-bapak perlu pemahaman. Budaya seperti ini mempengaruhi karena di Sukojember mayoritas Madura. sedikit banyak mempengaruhi”. (PLKB Kecamatan Jelbuk).

Munculnya persepsi bahwa persoalan stunting adalah urusan perempuan juga di dukung oleh prosentase pelaksana program percepatan penurunan stunting yang lebih banyak didominasi oleh perempuan. Dari TPPS desa Sukojember misalnya dari 11 pelaksana teridentifikasi 9 orang perempuan dan 2 orang laki-laki atau 18%. Sementara dari 12 pelaksana TPK, ada 1 orang laki-laki atau 8,3%. Sementara dari TK3KB teridentifikasi dari 18 pelaksana terdapat 7 atau 47% adalah laki-laki yang merupakan representasi dari institusi diantaranya dari Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD).

Persektif nilai gender tersebut berpengaruh terhadap kinerja organisasi, serta mendorong pelaksana untuk mengundurkan diri. Realitas menunjukkan bahwa pernyataan pengunduran diri tersebut telah diungkapkan kepada pemangku kepentingan, dan juga telah disampaikan kepada PLKB di tingkat kecamatan. Namun demikian, proses pergantian pelaksana tidak dapat dilaksanakan dengan serta merta sehingga tentu saja berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di desa Sukojember.

KESIMPULAN DAN SARAN

Komitmen, kesadaran, dan tanggung jawab pelaksana penting bagi keberhasilan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Komitmen tidak hanya tertuang dalam bentuk legal formal berupa surat keputusan Kepala Desa, tetapi juga peran dan keterlibatan aktif pelaksana sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi yang telah ditetapkan.

Melakukan evaluasi, dan monitoring terhadap kinerja tim percepatan penurunan stunting sangat diperlukan. Kegiatan ini memberikan arah bagi pemangku kepentingan untuk memberikan penilaian dan membuat keputusan apakah pelaksana tetap dipertahankan atau perlu ada pergantian sehingga tidak mengganggu tercapainya tujuan program.

Nilai budaya patriarki masyarakat desa Sukojember yang dominan dengan norma dan nilai Madura mempengaruhi persepsi dan mendorong individu untuk bertindak. Karenanya diperlukan penyadaran, dan edukasi kepada masyarakat bahwa persoalan stunting bukanlah hanya tanggung jawab perempuan/ Ibu sebagai pengurus rumah tangga. Eliminasi stunting adalah tanggungjawab bersama sebagai bagian kewajiban warga Negara.

ACKNOWLEDGMENT

Terimakasih kepada Forum Rektor, Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi Universitas Airlangga, BKKBN yang memberikan kesempatan kepada tim peneliti untuk mengikuti International Conference on Stunting 2022 “Acceleration of Stunting Reduction Through Specific and Sensitive Nutrition Interventions” pada 10-14 November 2022 di Hotel Indoluxe, Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Alizamar, & Couto, N. (2016). *Psikologi Persepsi & Desain Informasi; Sebuah Kajian Psikologi Persepsi dan Prinsip Kognitif untuk Kependidikan dan desain Komunikasi Visual*. Media Akademi.
- BPS, K. J. (2021). *Kecamatan Jelbuk Dalam Angka, Jelbuk District In Figures 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. <https://jemberkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/5a98641ebf268407eba17e2c/kecamatan-jelbuk-dalam-angka-2021.html>
- Humas, S. K. R. (2022). *Inilah Upaya Pemerintah Capai Target Prevalensi Stunting 14% di Tahun 2024*. Sekretariat Negara RI. Retrieved 2 Oktober from <https://setkab.go.id/inilah-upaya-pemerintah-capai-target-prevalensi-stunting-14-di-tahun-2024/>
- Ihya'Ulummudin, N., Mawlana, A., Septiana, A., & Legowo, M. (2022). MEMBONGKAR

BUDAYA PATRIARKI MADURA: STUDI FENOMENOLOGI PASAR TRADISIONAL DI DESA LABANG SEBAGAI RUANG PUBLIK PEREMPUAN MADURA. *Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa*, 6(2), 142-157.

- Kementerian Kesehatan, R. (2019). *Petunjuk Teknis Sistem Informasi Gizi Terpadu (Sigizi Terpadu)*. Direktorat Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. https://sigiziterpadu.kemkes.go.id/login_sisfo/assets/PANDUAN_SIGIZI_TERPADU.pdf
- Parsons, W. (2008). *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan* [Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis]. Kencana.
- Keputusan Bupati Jember No. 188.45/455/1.12/2021 tentang Penetapan Desa/ Kelurahan Lokus Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jember tahun 2022, (2021). http://dokum.jemberkab.go.id/upload/172/455-_2021_PENETAPAN_DESA_KELURAHAN_LOKUS_PERCEPATA.pdf
- PLKB Kecamatan Jelbuk. (2022). *e-PPGBM*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, (2021).
- Purnomo, D., Sampoerno, S., Hadiwijoyo, S. S., Utomo, A. W., Abraham, R. H., & Yanuartha, R. A. (2021). Pendampingan dan Penguatan Masyarakat dalam Pencegahan Stunting Melalui Pembelajaran Lapangan Terpadu. *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 214-244.
- Putri, S. P. (2022). *Efektivitas Program Kampung Kb Guna Mewujudkan Keluarga Kecil Mandiri Studi Kasus Kampung Kb Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar*
- Rato, D., & Zulaika, E. (2018). Studi Komparasi Hak Waris dalam Hukum Adat dan Islam di Masyarakat Madura Perantauan Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. *Lentera Hukum*, 5(3), 408-423.
- Saleh, A. A. (2018). *Pengantar Psikologi Aksara Timur*
- Sekretariat Wakil Presiden, R. (2022). *Pemkab Jember Ajak Lsm Lokal Turunkan Stunting*. Kementerian Sekretariat Negara RI, Sekretariat Wakil Presiden. Retrieved 12 Oktober from <https://stunting.go.id/pemkab-jember-ajak-lsm-lokal-turunkan-stunting/>

- Sudikno, d. (2019). *Laporan Akhir Penelitian Studi Status Gizi Balita Di Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Pusat Litbang Upaya Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI Retrieved from <https://cegahstunting.id/unduh/publikasi-data/>
- Suharti, R. (1995). Gender dan permasalahannya. *Buletin Psikologi*, 3(1), 44-50.
- Thoha, M. (2016). *Perilaku organisasi : konsep dasar dan aplikasinya*. Rajawali Pers.
- Tim Kementerian Dalam Negeri, Tim Kementerian Kesehatan, Tim Kementerian Desa PDTT, Tim BKKBN, Tim TP PKK, & Tim IBI. (2021). *Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Tingkat Desa/Kelurahan*. Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. <https://stunting.go.id/panduan-pelaksanaan-pendampingan-keluarga-dalam-upaya-percepatan-penurunan-stunting-di-tingkat-desa-kelurahan/>
- tnp2k. (2017). *100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Retrieved from <https://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Buku%20Ringkasan%20Stunting.pdf>
- tnp2k. (2018). *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/ Kota*. Jakarta: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Retrieved from <https://tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis%202018/Pedoman%20Pelaksanaan%20Intervensi%20Penurunan%20Stunting%20Terintegrasi%20Di%20Kabupaten%20Kota.pdf>